UNG Press

Dua Dekade
PROVINSI GORONTALO

Memotret Kemajuan dan Menggagas Agenda Pembangunan Ekonomi

Editor:
Muh. Amir Arham

ISBN : 978-623-284-003-4

DUA DEKADE PROVINSI GORONTALO
Memotret Kemajuan dan Menggagas Agenda Pembangunan Ekonomi

UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak terkait Pasal 49

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

DUA DEKADE PROVINSI GORONTALO
Memotret Kemajuan dan Menggagas Agenda Pembangunan Ekonomi

Muh. Amir Arham

ISBN : 978-623-284-003-4

Universitas Negeri Gorontalo Press
Anggota IKAPI
Jl. Jend. Sudirman No.6 Telp. (0435) 821125
Kota Gorontalo
Website : www.ung.ac.id

UNG Press

Universitas Negeri Gorontalo Press
Anggota IKAPI
Jl. Jend. Sudirman No.6 Telp. (0435) 821125
Kota Gorontalo
Website : www.ung.ac.id

© Muh. Amir Arham

DUA DEKADE PROVINSI GORONTALO
Memotret Kemajuan dan Menggagas
Agenda Pembangunan Ekonomi

ISBN : 978-623-284-003-4

i-viii, 135 hal; 18.5 Cm x 24.5 Cm
Desain Cover : Irvhan Male
Diterbitkan oleh : UNG Press Gorontalo
Cetakan Pertama : Agustus 2020

PENERBIT UNG Press Gorontalo
Anggota IKAPI
Isi diluar tanggungjawab percetakan

© 2020
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Universitas Negeri Gorontalo (UNG) akan memasuki usia yang ke 57, banyak asa yang telah digapai. Transformasi kelembagaan terus berjalan untuk dapat menjadi universitas setara dengan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. UNG telah mendharma baktikan dirinya melahirkan sumber daya manusia membangun daerah dan bangsa. Prestasi telah banyak ditorehkan, secara fisik bangunan kampus saat ini dapat membangkitkan spirit kemajuan, meskipun tidak dinafikkan masih terdapat kekurangan. Mengatasi kekurangan tersebut memerlukan sinergitas baik secara eksternal maupun internal, tanpa itu cita-cita universitas menjadi –Unggul dan Berdaya Saing—akan menghadapi rintangan.

Kerja sama UNG dengan pihak pemerintah terus digalakkan, sebab tanpa sokongan pemerintah UNG tidak dapat melakukan akselarasi. Sebaliknya pemerintah daerah membutuhkan perguruan tinggi (baca UNG), terutama merumuskan kebijakan dan perencanaan secara teknokratik. Selama ini perguruan tinggi secara umum seolah hidup di atas menara gading, menyendiri, memberi kesempatan untuk bersikap masa bodoh terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. UNG memerlukan reorientasi, tidak semata bersifat *inward looking* namun *outward looking* dibutukan, ia perlu memberikan nilai tambah tidak saja di daerah dimana bermukim, harus keluar dari area yang lebih luas (kawasan). Pengembangan kawasan membutuhkan konsepsi, peta jalan untuk berkembang, seperti Kawasan Teluk Tomini.

Secara regional, UNG berada di Provinsi Gorontalo dimana daerah ini diperhadapkan pada masalah kemiskinan yang masih tinggi, serta ketimpangan yang begitu lebar. Program pengentasan kemiskinan cukup banyak yang telah ditelorkan, tetap saja belum mampu diturunkan secara signifikan. Kalaupun terjadi penurunan, cenderung makin melambat, padahal disaat yang sama anggaran kian makin banyak, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Semakin melambatnya penurunan angka kemiskinan di tengah segudang program dan kucuran anggaran menyiratkan ada sesuatu yang salah membutuhkan solusi secara komprehensif, metode dan caranya, termasuk perlunya meredesain program penguatan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat selama ini kerap diidentikkan kerja-kerja pemerintah sendiri dan NGO, sementara perguruan tinggi relatif terbatas keterlibatannya. Menyahuti kondisi tersebut, UNG merumuskan beberapa misi untuk terlibat secara aktif memajukan masyarakat lewat pendampingan dan inovasi. Fokus keterlibatan UNG dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah perdesaan, sebab secara faktual angka kemiskinan perdesaan begitu tinggi. Prinsipnya, membangun desa berarti menyelesaikan separuh permasalahan pembangunan di Gorontalo maupun di Kawasan Teluk Tomini.

Provinsi Gorontalo sebentar lagi akan memasuki dua dekade, telah banyak kemajuan yang telah diraih tetapi masih berjibung tantangan membutuhkan sentuhan dan intervensi. UNG memiliki segudang ahli diberbagai disiplin ilmu, saatnya terlibat aktif dan massif berkontribusi membangun Gorontalo dan kawasan, minimal secara konsepsional dalam bentuk buku. Kumpulan tulisan ini sederhananya adalah kumpulan pemikiran para akademisi tentang perekonomian kemudian dibukukan dalam kerangka didekasikan untuk pembangunan daerah, sekaligus memotret kemajuan Gorontalo selama 20 tahun menjadi provinsi lepas dari Sulawesi Utara. Disamping mengurai permasalahan-permasalahan dari berbagai aspek yang masih membutuhkan perbaikan. Kumpulan tulisan diset dalam bentuk *Policy Brief* sebagai bentuk kepraktisan konsep mengakselarasi pembangunan Provinsi Gorontalo.

Penulisan *Policy Brief* selain sebagai masukan kepada pemerintah daerah, juga dimaksudkan memberi warna lain dalam memperingati Dies Natalis UNG. Selama ini peringatan hari lahirnya perguruan tinggi lebih banyak diwarnai kegiatan *entertaint*, kurang nampak nuansa akademiknya. Pada rancangan awal *Policy Brief* diharapkan lahir dari seluruh fakultas dan beragam disiplin keilmuan, tetapi karena berbagai kendala dan waktu yang sangat pendek. Maka *Policy Brief* ini masih terbatas di bidang ekonomi yang telah disiapkan jauh sebelumnya, ditambah dua tulisan dari fakultas lain yang senafas dengan bidang ekonomi untuk memperingati dua dekade Provinsi Gorontalo. Harapannya kedepan, kumpulan tulisan dari seluruh fakultas segera terwujud agar setiap peringatan dan momentum yang dihadapi lahir karya-karya mutakhir dari para dosen UNG.

Selesainya Policy Brief ini tentu tidak mudah, butuh komitmen yang kuat [illegible] sokongan dari berbagai pihak. Olehnya kami mengucapkan terima kasih dari para penulis, pihak pimpinan (Rektor UNG) atas dorongannya. Tak lupa kami haturkan terima kasih kepada pihak perpustakaan yang telah menginisiasi pencetakannya sehingga berwujud dalam bentuk buku. Puncak terima kasih yang tak bertepi kepada Tuhan semesta alam, Maha Alim. Semoga karya-karya kecil ini memberikan spirit untuk mencapai –UNG Unggul dan Berdaya Saing--.

Gorontalo, Agustus 2020

Editor

DAFTAR ISI

Pengantar Editor v
Daftar Isi viii

MEMOTRET PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN TRANSFORMASI EKONOMI GORONTALO
Muh. Amir Arham ..... 1 – 12

MENDORONG EKONOMI KREATIF DAN PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN DI PROVINSI GORONTALO
Fachrudin Z. Olilingo ..... 13 – 26

AKSELARASI PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA DI GORONTALO
Herwin Mopangga ..... 27 – 40

PENGEMBANGAN WISATA GASTRONOMI DI PROVINSI GORONTALO
Yumanraya Noho ..... 41 – 50

AKSELERASI PEMBANGUNAN EKONOMI GORONTALO MELALUI BONUS DEMOGRAFI
Sri Endang Saleh ..... 51 – 62

PENINGKATAN MUTU MODAL MANUSIA SEBAGAI PENDORONG PEMBANGUNAN GORONTALO
Heldy Vanni Alam ..... 63 – 74

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PROVINSI GORONTALO
Hais Dama ..... 75 – 84

MENIMBANG SENI SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI ERAKYATAN
I Wayan Sudana ..... 85 – 98

TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH; APBD SEBAGAI PENDORONG EKONOMI GORONTALO
Rio Monoarfa ..... 99 – 116

PROSPEK DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN EKONOMI, BISNIS, DAN AKUNTANSI SYARIAH DI PROVINSI GORONTALO
Niswatin ..... 117 – 126

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PROFESIONALITAS APARATUR UNTUK MENGGERAKKAN PEMBANGUNAN GORONTALO
Zuchri Abdussamad ..... 127 – 135

PROSPEK DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN EKONOMI, BISNIS, DAN AKUNTANSI SYARIAH DI PROVINSI GORONTALO

Niswatin

Pendahuluan

Sistem ekonomi syariah (Islam) termasuk sub sistem bisnis syariah dan akuntansi syariah yang dipraktikkan oleh perbankan dan lembaga non bank di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim merupakan sebuah upaya reformasi ekonomi secara makro (Askari dkk, 2014). Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan reformasi sistem ekonomi, bisnis, dan akuntansi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Indonesia dengan penduduk muslim sebesar 87,18% (hasil sensus penduduk tahun 2010 dalam Badan Pusat Statistik tahun 2016) memiliki potensi besar dalam melakukan pengembangan sistem ekonomi (termasuk bisnis dan akuntansi) yang sesuai dengan agama dan budayanya (Mashdurohatun, 2011; Muqorobin, 2013; Mulawarman, 2013; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018; dan Arif, 2019).

Perkembangan ekonomi, bisnis, dan termasuk akuntansi syariah di Indonesia telah mengalami masa keemasan bila ditinjau dari aspek peningkatan praktik bisnis syariah dan perhatian dunia akademik (Mulawarman, 2013). Dari aspek praktiknya, data statistik Perbankan Syariah per Juni tahun 2017 menunjukkan perkembangan jumlah bank umum syariah sebanyak 13 bank dengan unit pelayanan sebayak 1.188 kantor, bank konvensional yang memiliki unit syariah sebanyak 21 bank dengan unit pelayanan 135 kantor, dan bank pembiayaan rakyat syariah sebanyak 101 kantor pusat operasional. Sedangkan dari aspek akademisnya ditunjukkan dengan semakin banyaknya pembukaan konsentrasi atau program studi Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Manajemen Keuangan Syariah, dan Akuntansi Syariah di beberapa perguruan tinggi (PT), serta meningkatkan pelatihan terkait ekonomi syariah.

Gorontalo sebagai salah satu provinsi di Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan sistem ekonomi, bisnis, dan akuntansi syariah jika ditinjau dari aspek sosial dan budayanya (Niswatin dkk, 2016). Provinsi Gorontalo memiliki penduduk mayoritas Muslim sebesar 96,87% (Sumber data dari Kementerian Agama Provinsi Gorontalo tahun 2018). Selain itu, masyarakatnya memiliki filosofi hidup "Adat bersendikan Sara'a, sara'a

bersendikan Kitabullah". Filosofi ini bermakna bahwa masyarakat Gorontalo meyakini nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam kehidupannya, termasuk dalam kehidupan ekonomi, bisnis, dan akuntansinya. Kenyataan ini menandai bahwa pengembangan ekonomi, bisnis, dan akuntansi syariah memiliki prospek yang baik sebagai alternatif model pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Permasalahan

Islam datang ke bumi untuk memberikan rahmat dan sekaligus pencerahan bagi umat manusia. Lahirnya pemikiran dan praktik sistem ekonomi (termasuk bisnis dan akuntansi) syariah didasarkan pada keyakinan bahwa Islam sebagai agama yang sempurna. Ajarannya tidak hanya mengatur soal Ketuahan dan keimanan, bahkan lebih komprehensif. Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk bagaimana sistem ekonomi, bisnis, dan juga tehnis akuntansi. Sebagaimana Firman Allah SWT:

> *"Pada hari ini telah Ku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Ku telah ridhoi Islam menjadi Agama bagimu"*(QS Surat Al-Maidah:3)

Harapan dengan lahirnya sistem ekonomi Islam dan penerapannya, diantaranya adalah perbaikan dari tata kehidupan (etika) bisnis ekonomi berbasis Islam yang di dalamnya terimplementasi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama karena Islam adalah *Rahmatan Lilalamin* (rahmat bagi seluruh alam). Nilai-nilai tersebut kesemuanya didasari oleh ajaran/nilai-nilai yang bersumber pada Al-quran dan hadits sebagai sumber pegangan Islam (Kuran, 1995; Sarea dan Hanefah, 2013; dan Askari dkk, 2014).

Seiring dengan berkembangnya praktik sistem ekonomi syariah, bisnis syariah juga mengalami perkembangan. Praktik bisnis syariah sudah banyak dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah dengan mengonversi prinsip nilai-nilai Islam ke dalam pengelolaanya, diantaranya, bisnis kosmetik, industri fashion, kuliner/restauran, hotel, salon, spa, supermarket/swalayan, property, dan juga fasilitas pariwisata. Pebisnis Islam sudah mulai menampilkan label Islam atau syariah dalam ruang publik sebagai identitas bisnisnya, seperti hotel syariah, salon/spa syariah, property syariah, dan pariwisata syariah, serta kuliner syariah (Utama, 2015; Ramadani et al, 2015; dan Wilson, 2006).

Seiring dengan kehadiran dan berkembangnya praktik ekonomi dan bisnis syariah, juga menuntut lahirnya sistem akuntansi syariah yang berbasis nilai-nilai islam (Trokic, 2015; Sarea dan Hanefah, 2013; Napier, 2009). Menurut Trokic (2015) yang mengutip pendapat Karim (1999), definisi akuntansi syariah sebagai proses akuntansi yang berfungsi memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa entitas mereka terus beroperasi di bawah hukum Islam, sambil memenuhi tujuan sosial-ekonomi. Standar Akuntansi Syariah berperan penting dan menjadi alat penting yang bisa memenuhi berbagai kebutuhan lembaga keuangan Islam dan sebagai sebagai dasar dalam penentuan nilai zakat (Trokic, 2015).

Di Indonesia, sejarah pergerakan ekonomi syariah sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1911. Hal ini ditandai berdirinya organisasi Syarikat Dagang Islam yang dipelopori oleh para pengusaha dan para tokoh Muslim saat itu. Bahkan, bila ditelusuri lebih lanjut maka pergerakannya jauh sebelum tahun 1911. Hal ini dibuktikan oleh penelitian ahli sejarah dan antropologi, Clifford Geertz seorang antropolog AS terkemuka. Dalam bukunya yang berjudul *"The Religion of Java"* (1960), Geertz menuliskan bahwa Pengusaha Santri Muslim dipengaruhi oleh etos kerja Islam dan etos kewirausahaann dibandingkan dengan kaum abangan yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan Budha (Mashdurohatun, 2011).

Penelitian Geertz tersebut memberikan penguatan bahwa semangat masyarakat Indonesia untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam berekonomi termasuk dalam berbisnis sebenarnya telah lama dicita-citakan. Namun, secara umum tonggak sejarah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mulai dikenal di tahun 1992. Penanda dari diterimanya sistem ekonomi syariah sebagai basis sistem perekonomian di Indonesia ditandai dengan lahirnya bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Dari saat itu hingga kini, pertumbuhan perbankan syariah sebagai salah satu instrumen dari sub ekonomi syariah (termasuk sub sektor lainnya, diantaranya; manajemen, manajemen keuangan, bisnis, perdagangan, pembanguanan, asuransi, dan akuntansi) mengalami perkembangan yang pesat (Muqorobin, 2013).

Pengembangan ekonomi syariah beserta sub sistemnya di Indonesia memiliki visi yang selaras dengan tujuan yang ingin dicapai oleh negara Republik Indonesia ke depan dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi, baik secara lokal maupun global. Adapun visi ekonomi syariah yang dijelaskan dalam masterplan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah menjadikan Indonesia yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018. Mandiri berarti

Indonesia memiliki kemampuan menggerakkan ekonominya dengan kekuatan dan pemberdayaan domestik terutama dengan potensi dan sumber daya lokal. Kemandirian ini juga dapat diartikan dengan mampu mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan. Makmur berarti Indonesia menyejahterakan rakyat dan mereduksi ketimpangan ekonomi. Secara mendasar, kemakmuran akan terwujud ketika segala kebutuhan utama rakyat dapat terpenuhi. Pemanfaatannya untuk memproduksi dan mengonsumsi industri ini sesuai dengan nilai syariah, sehingga proses dan penggunaan barang dan jasa di dalamnya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada konsumen dan produsen. Madani berarti Indonesia bercita-cita mewujudkan masyakarat madani yang memanifestasikan nilai-nilai masyarakat ke dalam kehidupan berekonomi yang menjadi nilai bersama. Ekonomi dan masyarakat madani merupakan ciri sekaligus tujuan ekonomi Islam.

Gorontalo memiliki nilai kearifan lokal yang menjadi keunggulan daerah, diantaranya adalah memiliki filosofi hidup "Adat bersendikan Sara'a, Sara'a bersendikan Kitabullah". Masyarakatnya memiliki keinginan untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. Sebagaimana kutipan di bawah ini:

> *"Sementara Gorontalo, di zaman pemerintahan Islam mencapai puncak kejayaannya dengan prinsip " Adat bersendikan sara'a, sara'a bersendikan Kitabullah" dimana semua aspek kehidupan masyarakatanya terbangun dengan sangat baik. Oleh karena itu, kiranya tak berlebihan bila kita menyebut Gorontalo di jaman itu tak ubahnya "Serambi" Madinah karena kemiripannya dengan Negara madinah di jaman Rasul. Singkatnya mengembalikan kebudayaan masyarakat Gorontalo kepada jaman Islam samalah maknanya dengan membuatnya menjadi Serambi Madinah lagi" (Botituhe, 2003:215).*

Kutipan di atas memberikan makna bahwa masyarakat Gorontalo memiliki cita-cita yang mulia. Masyarakat Gorontalo mendambakan miniatur kota Madinah di mana masyarakatnya menjadi sebuah masyarakat Madani. Cita-cita yang mengantarkan masyarakatnya sejahtera dan berkualitas dengan berpedoman pada adat bersendikan sara'a, sara'a bersedikan kitabullah yang akhirnya bermuara pada Gorontalo Serambi Madinah.

Cita-cita tersebut dapat terwujud jika didukung dengan penerapan segala sendi kehidupan berdasarkan nilai-nilai Islam (Islam), di antaranya ekonomi dan bisnis Islam. Dengan penerapan ini, kelak Serambi Madinah bukan hanya sebatas simbol yang dapat dibanggakan dari segi lisan, namun menjadi sebuah bukti bahwa masyarakat Gorontalo senantiasa melakukan perubahan ke arah hidup yang lebih baik sebagaimana cita-citanya mewujudkan menjadi masyarakat Madani.

Selain filosofi hidup yang dimiliki oleh masyarakat Gorontalo, potensi terbesar terimplementasikan sistem ekonomi, bisnis, dan akuntansi syariah di daerah ini adalah jumlah penduduk Muslim menjadi mayoritas, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah :

Tabel 1: Persentase Penduduk Provinsi Gorontalo Menurut Agama

Wilayah se Provinsi	2017 Persentase Penduduk Menurut Agama (Persen)				
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
Boalemo	96.07	1.36	0.87	1.69	0.02
Gorontalo	99.12	0.56	0.28	0.02	0.01
Pohuwato	93.08	4.81	1.16	0.93	0.03
Bone Bolango	99.62	0.25	0.11	0	0
Gorontalo Utara	93.92	5.32	0.73	0.01	0.02
Kota Gorontalo	95.71	2.42	1.29	0.11	0.45
Provinsi Gorontalo	96.87	1.99	0.68	0.38	0.08

Sumber: Kemenag Provinsi Gorontalo 2018

Jumlah penduduk Muslim sebesar 96,87% menjadi potensi yang produktif untuk menjadi produsen serta konsumen dalam memanfaatkan segala produk dari sistem ekonomi Islam. Populasi penduduk Muslim yang besar dapat menjadi sebagai konsumen atau pasar produk/jasa halal terbesar. Kesadaran masyarakat untuk beragama secara komprehensif telah mendorong mereka berusaha mengonversi konsumsi barang dan jasa menjadi halal.

Upaya untuk mengembangkan sistem ekonomi, bisnis, dan akuntansi syariah tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang nampaknya masih perlu dicarikan solusi untuk mencapai visinya. Secara umum, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Gorontalo (Niswatin dkk, 2016), adalah:

1. Pertumbuhan lembaga keuangan yang sangat pesat, belum sebanding dengan meningkatnya jumlah nasabah. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam berekonomi, berbisnis, berakuntansi yang sesuai dengan etika bisnis yang Islami. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya masyarakat yang memiliki persepsi bahwa tidak

ada perbedaan secara prinsip operasional antara lembaga keuangan Islam dengan lembaga keuangan konvensional, perilaku tidak jujur dalam penyampaian harga pokok penjualan oleh pedagang di pasar, dan masih minimnya kesadaran dalam membayar zakat harta bagi perorangan ataupun perusahaan.

2. Peran Perguruan Tinggi (PT) yang berada di Gorontalo telah berupaya mendukung pengembangan ekonomi Islam, yaitu IAIN Sultan Amai telah membuka program studi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah, serta Akuntansi Syariah. Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dalam kurikulum di Fakultas Ekonomi (FE) telah menjadikan mata kuliah Ekonomi Syariah dan Akuntansi Syariah sebagai mata kuliah pilihan peminatan. Begitupun di PT lainnya. Namun kenyataannya, upaya ini belum dinilai maksimal sebagai program edukasi dan sosialisasi untuk menumbuhkan pengetahuan dan kesadaran tentang ekonomi, bisnis, dan akuntansi syariah. Edukasi pada PT dinilai belum cukup karena jumlah siswa yang menamatkan pendidikan di jenjang Sekolah menengah Atas/sederajat dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat jumlahnya masih lebih banyak. Hal ini mengakibatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai penggerak perekonomian syariah beserta sub sistemnya dinilai masih sangat terbatas.
3. Secara nasional, regulasi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan potensi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yaitu melalui dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Provinsi Gorontalo telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung perekonomian masyarakat Gorontalo. Namun kondisi saat ini, regulasi pemerintah daerah baik provinsi maupun kota/kabupaten masih sebatas mengatur tanggung jawab berzakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui kebijakan zakat profesi. Selain itu, ditemukan tingkat transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan BAZNAS masih banyak yang belum memenuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 109.
4. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah saat ini masih sangat berpihak pada pemanfaatan perbankan konvensional. Hal ini dapat dibuktikan dengan ketentuan pemerintah atau pimpinan intansi yang mengharuskan bagi staf atau pegawainya untuk membuka rekening di bank konvensional.
5. Gorontalo dengan jumlah penduduk muslim yang mayoritas berpotensi sebagai pangsa pasar konsumsi makanan halal terbesar dan juga menjadi produsen makanan halal terbesar dengan kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya. Namun peluang untuk memperkenalkan kuliner halal masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Jumlah UMKM dan Koperasi di Gorontalo jumlahnya relatif besar, namun yang dikelola dengan label syariah masih sangat minim/terbatas.
6. Peran Majilis Ulama Indonesia (MUI) hanya lebih banyak menangani persoalan yang berkaitan dengan program keagamaan (ibadah ritual), sedangkan perannya dalam penerapan ekonomi Islam termasuk program pembinaan dirasakan masih sangat kurang.

Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan yang ditawarkan untuk pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya sebagai strategi yang ditempuh dalam pengembangan ekonomi, bisnis, dan akuntansi syariah di Gorontalo adalah:

1. Strategi yang ditawarkan secara nasional dengan mengacu pada masterplan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia melalui empat (4) penguatan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018), yaitu:
   a. Penguatan rantai nilai halal (*halal value chain*/ HVC) dengan fokus pada sektor atau klaster yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi. Untuk mendukung penguatan ini, diperlukan peran Perguruan Tinggi yang ada di Gorontalo melalui riset kerjasama dalam rangka menemukan sektor atau klaster prioritas yang perlu dikembangkan sesuai dengan kondisi Gorontalo.
   b. Penguatan sektor keuangan syariah, yang rencana induknya dituangkan dalam Masterplan Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) dan disempurnakan dalam rencana induk ini. Untuk mendukung penguatan ini, diperlukan upaya pemerintah Gorontalo mencari investor yang potensial.
   c. Penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai penggerak utama rantai nilai halal. Untuk mendukung hal ini, diperlukan strategi regulasi pemerintah Gorontalo dalam mempermudah proses legalitas berdasarkan prinsip Islam, termasuk legalitas sertifikat kehalalan produk.
   d. Pemanfaatan dan penguatan platform ekonomi digital dalam hal perdagangan (*e-commerce, market place*) dan keuangan (teknologi finansial/tekfin) yang diharapkan bisa mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya. Untuk mendukung penguatan ini, diperlukan program literasi digital bagi UMKM di Gorontalo.

2. Strategi khusus yang ditawarkan untuk pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya sebagai strategi dasar yang harus dilakukan untuk merealisasikan keberhasilan pengembangan ekonomi, bisnis, dan akuntansi syariah di Gorontalo. Strategi yang ditawarkan berdasarkan pada realitas permasalahan yang saat ini dihadapi adalah:
   a. Pendekatan mobilitas sosial dengan merevitalisasi fungsi lembaga pendidikan (sekolah menengah) dalam program edukasi dan sosialisasi sejak dini tentang ekonomi, bisnis, dan akuntansi syariah melalui pengembangan model kurikulum ekonomi syariah dan akuntansi syariah di sekolah menengah tingkat atas/sederajat sangat diperlukan. Serta mendorong peran PT, Kementerian Agama, Organisasi Masyarakat Islam, Masjid dalam melakukan sosialisasi dan edukasi untuk menumbuhkan atau meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya penerapan ekonomi, bisnis, dan akuntansi berbasis nilai-nilai Islam.
   b. Pendekatan kultural melalui pengembangan ekonomi, bisnis, dan akuntansi berbasis masjid dan pesantren dalam melakukan pemberdayaan di bidang ekonomi, baik dalam pembinaan ataupun pengelolaan usaha produktif UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan jamaah.
   c. Pendekatan struktural melalui intervensi pemerintah dan Organisasi Masyarakat Islam dalam membuat regulasi untuk mendukung pengembangan ekonomi dan bisnis Islam. Beberapa tawaran upaya yang dapat dilakukan terkait strategi ini, di antaranya adalah: *pertama*, Regulasi terkait konversi UMKM dan Koperasi konvensional ke Islam dan pendirian Baitul Maal Wat Tammil (BMT). *Kedua*, Regulasi Peraturan Daerah (PERDA) mengenai Pemberlakukan Zakat bagi Pengusaha Muslim. *Ketiga*, Regulasi mengenai kebebasan masyarakat untuk memilih bertransaksi di lembaga keuangan Islam. Dan *keempat*, regulasi untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola pelaporan keuangan bagi tiap pelaku bisnis syariah sebagai dasar perhitungan zakat institusi.

Referensi:

..... 2002. Al-quran dan terjemahannya. CV. Pustaka Agung Harapan. Jakarta.

Arif, Z. (2019(. Optimalisasi Peluang dan Tantangan Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Journal of Economics and Banking: Al-Maal, 1 (1), 83 – 93.

Askari, H., Zamir, I, Krichene, N. & Mirakhor, A. (2014). Understanding Development in An Islamic Framework. Islamic Economic Study, 22 (1), 1 - 36.

Botutihe, M. 2003. Gorontalo Serambi Madinah: Obsesi dan Perubahan Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Berkualitas. PT. Media Otda.

Fauzi, Ahmad. 2017. Pengembangan Ekonomi Islam di Pesantren Jawa Timur. Jurnal Al-Ulum, 17 (1), 100 – 119.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2018. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024: Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia.

Kuran, T. (1995). Islamic Economics and the Islamic Subeconomy. The Journal of Economic Perspectives, 9 (4), 155 – 173.

Masdhurohatun, A. (2011). Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi. Jurnal Dinamika Hukum, 11 (...), 76-88.

Mulawarman, A. D. (2013). Masa Depan Ekonomi Islam: dari Paradigma Menuju Metodologi. Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam: IMANENSI, 1 (1), 1 - 13.

Muqorobin, M. (2013). Peluang dan Tantangan Pengembangan Ekonomi Syariah di Perguruan Tinggi. Jurnal Al-Ihkam, 8 (1), 163 - 188.

Napier, C. (2009). Defining Islamic Accounting: Current Issues, Past Roots. Accounting History, 14 (1 & 2), 121 - 144.

Niswatin, Rasuli, L. & Monoarfa, R. (2016). Development Strategy of Islamic Economic, Business and Accounting In Gorontalo, Indonesia. International Journal of Economic Research, 13 (7), 3083 – 3096.

Niswatin, Yusuf, N. & Mahdalena. (2015). Revitalisasi Perekonomian Berbasis Syariah di Gorontalo. Prosiding. Seminar Nasional Akselerasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Universitas Negeri Gorontalo.

Niswatin, Laliyo, L. & Rasuli, L. (2017). Potential Resources Based On Economic Education Business and Islamic Accounting In Gorontalo, Indonesia. International Journal of Business and Management Invention (IJBMI), 6 (10), 51 – 55.

Niswatin, Hasiru, R. & Rasuli, K. (2017). Pengembangan Kurikulum Ekonomi dan Akuntansi Syariah di Sekolah (Studi atas Persepsi Guru dan Siswa di SMA Kota Gorontalo). Jurnal Al-Ulum, 17 (1), 86 - 99.

Sarea, A. M. & Hanefah. M. (2013). The Need of Accounting Standards for Islamic Financial Institutions. International Management Review, 9 (2), 50 – 59.

Sofhian. (2017). Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Berbasis Kearifan Lokal Gorontalo. Jurnal Al-Ulum, 17 (1), 166 - 182.

Ramadan, V., Dana, L-P., Ratten, V. & Tahiri, S. (2015). The Context of Islamic Intrepreneurship and Business: Concept, Principles and Perspectives. International Journal of Business and Globalisation, 15 (3), 244 – 261.

Trokic, A. (2015). Islamic Accounting; History, Development and Prospects. *European Journal of Islamic Finance*, 12 (3), 1 – 6.

Utama, W. S. (2015). Incorporating Spririituality and Market: Islamic Sharia Business and Religious Life in Postt-New Order Indonesia. Masyarakat: Jurnal Sosiologi, 20 (2), 113 - 137.

Wilson, R. (2006). Islam and Business. Thunderbird International Business Review, 48 (1), 109 - 123.